



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6385-6396

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Ernalko^{1✉}, Zaili Rusli², Febri Yuliani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: ernalko11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pentingnya akseptabilitas pemerintah Kabupaten terletak pada keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Ketika masyarakat merasa puas dan percaya pada kinerja pemerintah Kabupaten, kemungkinan besar mereka akan mendukung inisiatif-inisiatif pemerintah, serta lebih kooperatif dan terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, rendahnya akseptabilitas dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat, resistensi terhadap kebijakan, dan bahkan ketidakstabilan politik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang Akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten kuantan singingi, Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau telah berjalan tepat waktu dan sesuai waktu. Perwakilan dari setiap kelurahan dan desa berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2022, yang berfungsi sebagai fasilitator dan pemangku kepentingan, memastikan bahwa sasarannya tercapai dengan tepat. Namun, tetap dalam pelaksanaannya tetap didominasi oleh pihak stakeholder dari pemerintahan dan Pemegang kekuasaan memiliki kendali atas proses pengambilan keputusan, meskipun mereka menerima masukan dari masyarakat

Kata Kunci: Akseptabilitas Pemerintah, Musyawarah perencanaan pembangunan.

Abstract

The importance of district government acceptability lies in the sustainability and effectiveness of local government administration. When the community feels satisfied and has confidence in the performance of the District government, they are more likely to support government initiatives, and be more cooperative and involved in development and governance. Conversely, low acceptability can result in public distrust, resistance to policies, and even political instability. The aim of this research is to find out about the acceptability of the district government towards the Development Planning Conference (Musrenbang) of Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency. The research method in this writing uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the Pucuk Rantau District Musrenbang has run on time and on time. Representatives from each sub-district and village participated in the 2022 Pucuk Rantau District Musrenbang, serving as facilitators and stakeholders, ensuring that targets were achieved appropriately. However, its implementation remains dominated by government stakeholders and power holders have control over the decision-making process, even though they receive input from the community.

Key Words: Government acceptability, development planning deliberations.

PENDAHULUAN

Akseptabilitas pemerintah Kabupaten terhadap Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor-faktor yang memengaruhi akseptabilitas ini melibatkan efektivitas pelayanan publik, kebijakan yang diimplementasikan, transparansi, keadilan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Akseptabilitas yang tinggi dapat memperkuat partisipasi masyarakat, mendukung inisiatif pemerintah, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya akseptabilitas dapat menimbulkan ketidakpercayaan, resistensi terhadap kebijakan, dan bahkan instabilitas politik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten perlu terus berupaya meningkatkan akseptabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan memastikan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks Musrenbang, akseptabilitas pemerintah juga tercermin dalam penerimaan dan pengakuan terhadap hasil dan rekomendasi forum Musrenbang. Peningkatan partisipasi masyarakat, komunikasi dua arah yang lebih baik, dan pemahaman yang mendalam terhadap aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan akseptabilitas yang optimal.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi, merupakan landasan keberlanjutan pembangunan daerah. Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan, lima pendekatan digunakan, termasuk pendekatan partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi wadah utama untuk menggali aspirasi masyarakat dan menyusun rencana pembangunan. Pengaturan pelaksanaan Musrenbang telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Keberhasilan SPPN dan Musrenbang ditujukan untuk mendukung kondisi antar pelaku pembangunan, menciptakan integrasi, dan memastikan partisipasi masyarakat yang optimal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka.

Fenomena menarik terkait dengan pelaksanaan musrenbang tersebut adalah hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan apa yang direncanakan oleh masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan public yang urgent diusulkan secara langsung oleh masyarakat ternyata kurang menjadi prioritas, sehingga hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di kecamatan pucuk rantau. Proses perencanaan pembangunan sangat vital bagi setiap daerah, membutuhkan identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan spesifik setiap daerah. Meskipun perencanaan yang matang penting, pelaksanaan pembangunan masih dapat terhambat oleh berbagai masalah. Mekanisme, struktur, dan proses perencanaan harus dipersiapkan dengan cermat oleh pemerintah, melibatkan identifikasi data dari berbagai aspek kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat menjadi aspek kunci. Partisipasi masyarakat dianggap vital dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang tepat. Proses mobilisasi dalam perencanaan dan pembangunan menjadi esensial, di mana partisipasi bukan hanya tanggung jawab masyarakat atau pemerintah, tetapi kolaborasi untuk merumuskan perencanaan yang optimal. Pada tingkat pelaksanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terdapat faktor penghambat yang dapat diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan karakteristik individu atau kelompok masyarakat, seperti sifat egosentris, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pandangan politik. Sementara faktor eksternal melibatkan aspek di luar masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi yang mencapai masyarakat dan pembatasan jumlah peserta Musrenbang Desa melalui undangan terbatas. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan menuju hasil yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan sangat krusial dalam mencapai kesuksesan pembangunan daerah. Perencanaan melibatkan pemilihan tujuan yang konkret dan pemilihan cara-cara alternative yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Di Kabupaten Kuantan Singingi, seperti di banyak daerah lainnya, perencanaan prioritaskan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dianggap penting. Namun, implementasi Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau belum optimal. Masyarakat kurang menyadari peran dan kontribusinya dalam perencanaan, terlihat dari kurangnya tanggapan terhadap proses dan ketidaksesuaian dalam hasil pembangunan. Sosialisasi yang kurang menyeluruh menjadi salah satu penyebabnya.

Masalah ini juga tercermin dalam kurangnya akses internet (4G) di Kecamatan Pucuk Rantau, menghambat kinerja pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi digital. Usulan pembangunan tower Telkomsel dalam Musrenbang Kecamatan menjadi langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses Musrenbang menjadi tantangan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang akseptabilitas pemerintah terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk memahami lebih lanjut dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber informasi yang berupa manusia (narasumber) itu sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan penelitian dalam tulisan ini ialah Camat kecamatan pucuk rantau, Sekcam kecamatan pucuk rantau, Kelompok jabatan fungsional kecamatan pucuk rantau, Masyarakat peserta musrenbang. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara (interview), Observasi, Dokumentasi. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dnegan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, akseptabilitas pemerintah terhadap Musrenbang dapat dilihat dari tiga aspek: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan mencakup ketepatan waktu, pemilihan yang tepat, dan pencapaian sasaran. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau pada awal tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam aspek ini, dengan melibatkan masyarakat dan pengiriman hasil ke Kabupaten sesuai waktu yang ditentukan. Hasil Musrenbang Kecamatan, seperti rekapitulasi usulan dan draf Rencana Pembangunan Kecamatan, telah disusun secara koordinatif dengan Musrenbang Kelurahan. Proses ini memastikan keselarasan usulan dengan prioritas dan pagu anggaran, dengan melibatkan Tim Perumus dan Tim Delegasi Kecamatan. Hal ini memperkuat akseptabilitas pemerintah terhadap hasil Musrenbang Kecamatan, seiring dengan komitmen untuk mendengarkan, menanggapi, dan bekerja sama dengan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau menunjukkan ketepatan waktu yang menjadi penilaian penting dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kinerja Kecamatan. Komitmen politik dan efisiensi dalam menyusun agenda Musrenbang menciptakan akseptabilitas pemerintah terhadap hasil Musrenbang. Stakeholder yang terlibat, termasuk perwakilan dari setiap kelurahan dan desa, berperan sebagai fasilitator dengan keterampilan organisasi, analisis, dan pemahaman yang mendalam. Keberhasilan ini menjadi faktor utama dalam mencapai akseptabilitas pemerintah terhadap Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau, keterlibatan stakeholder menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan. Menurut Bapak Camat, pelibatan pihak terkait dilakukan dengan tepat waktu untuk mencapai hasil yang maksimal, menjadikan Musrenbang bersifat partisipatif dan akuntabel. Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga legislatif, kelompok masyarakat, dan LSM, diidentifikasi sebagai stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Ketepatan sasaran dalam Musrenbang Kecamatan Pucuk

Rantau dilakukan dengan memanfaatkan pemahaman dan informasi dari pemangku kepentingan. Pemerintah Kecamatan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang, menciptakan kesempatan bagi stakeholders untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan yang inklusif diharapkan menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun pelibatan stakeholder telah terjadi, evaluasi menunjukkan bahwa masih terjadi dominasi pihak pemerintah, dan partisipasi masyarakat masih terbilang pasif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar Musrenbang dapat lebih melibatkan masyarakat setempat secara masif. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih kredibel dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau memberikan kontribusi positif terhadap akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap hasil dan rekomendasi Musrenbang.

2. Integrasi

Integrasi dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau mencakup kemampuan organisasi untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan dengan masyarakat dan SKPD terkait. Komunikasi yang terjadi saat ini masih bersifat satu arah, terutama melalui undangan kepada stakeholder yang terlibat. Diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi Musrenbang menjadi kunci untuk memastikan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat. Saat ini, komunikasi lebih fokus pada undangan, namun pihak kecamatan membuka peluang untuk lebih banyak melibatkan kelurahan dalam kegiatan sosialisasi. Pemerintah Kecamatan perlu membentuk komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif.

Konsensus dalam Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau dicapai melalui musyawarah mufakat. Meskipun ada panduan isu strategis dari pemerintah, keputusan akhir tetap melibatkan kesepakatan bersama dengan pihak yang hadir dalam musrenbang. Terdapat pengaruh pagu anggaran dalam menentukan prioritas pembangunan, namun tetap dengan pendekatan musyawarah. Perlu adanya upaya strategis dari pemerintah kecamatan, termasuk komunikasi yang jelas dan efektif, untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap tujuan, proses, dan hasil Musrenbang dapat tumbuh dengan menjelaskan secara terperinci. Dengan keterlibatan yang berkelanjutan, kepercayaan dan akseptabilitas terhadap pemerintah dapat meningkat.

3. Adaptasi

Adaptasi pemerintah Kecamatan Pucuk Rantau terhadap pelaksanaan Musrenbang tampak positif, dengan upaya penyesuaian terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Sebagai daerah pemekaran sejak 2012, Kecamatan Pucuk Rantau berusaha memperbaiki diri selama 11 tahun pemerintahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan baik, melibatkan seluruh pegawai kecamatan dalam kepanitiaan. Pemerintah Kecamatan Pucuk Rantau berperan aktif dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mengurangi campur tangan yang dominan, dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya. Meskipun demikian, masih ada upaya yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Musrenbang.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Pucuk Rantau menghadapi tantangan sebagai wilayah pemekaran, dan masih memerlukan adaptasi dan perbaikan dalam sistematisasi dan konsistensi pelaksanaannya. Prioritas pembangunan cenderung fokus pada infrastruktur, sesuai dengan arah pembangunan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Proses penentuan usulan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan visi misi Bupati dan pagu anggaran. Skala prioritas menjadi panduan dalam menilai dan memandu usulan program dan kegiatan, dengan fokus pada urgensi, manfaat, pemeliharaan, dan cakupan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman tentang pentingnya Musrenbang tetapi juga mengenai alur dan mekanisme usulan prioritas. Pemahaman ini diperlukan agar tidak terjadi perselisihan di antara masyarakat terkait usulan yang akan diajukan pada Musrenbang berikutnya. Akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap hasil Musrenbang Kecamatan dapat dilihat dari partisipasi aktif SDM kecamatan dalam kepanitiaan, serta masyarakat yang dapat beradaptasi dengan pelaksanaan dan hasil Musrenbang tanpa tindakan anarkis. Sebagai rekomendasi, perlu terus dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang, serta konsistensi dan sistematisasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir ketidakadilan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Dalam konteks pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan tersebut.

- 1) Komitmen Pemimpin (Camat): Komitmen politik yang tinggi dari Camat menjadi pendorong utama keberhasilan Musrenbang. Peran strategis Camat dalam mengatur pemberdayaan masyarakat dan mengawasi kegiatan desa sangat memengaruhi keberhasilan keseluruhan kegiatan. Camat juga memiliki peran dalam memberikan motivasi kepada pegawai kecamatan dan masyarakat, membimbing pelaksanaan Musrenbang, serta mempengaruhi keputusan mufakat terkait usulan prioritas.
- 2) Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia): Keberhasilan Musrenbang Kecamatan juga bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen. Tim panitia yang terdiri dari 20 orang berhasil menjalankan Musrenbang dengan baik. Keterlibatan stakeholder dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas sangat mendukung pelaksanaan Musrenbang.
- 3) Ketepatan Hasil (Output): Hasil dari Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pagu anggaran. Faktor ketepatan hasil ini menjadi kunci untuk menciptakan akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Musrenbang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses dan hasil Musrenbang turut mendukung penerimaan dari pemerintah kabupaten.

Dengan demikian, melalui komitmen pemimpin, kompetensi SDM, dan ketepatan hasil, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau berhasil menciptakan akseptabilitas pemerintah kabupaten. Proses yang transparan dan terdokumentasi dengan baik juga menjadi faktor pendukung yang memperkuat penerimaan dari pemerintah kabupaten terhadap Musrenbang di kecamatan tersebut.

2. Faktor Penghambat

Pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat memengaruhi akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap kegiatan tersebut.

- 1) Keterbatasan Pagu Anggaran: Keterbatasan pagu anggaran menjadi hambatan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan. Meskipun Kecamatan Pucuk Rantau telah mengambil pendekatan cermat dan partisipatif untuk menentukan kebutuhan yang paling penting, tetapi keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan dalam menyusun usulan Musrenbang.
- 2) Minimnya Kesadaran Masyarakat terhadap Musrenbang: Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang menjadi hambatan serius. Beberapa masyarakat menganggap bahwa Musrenbang kurang penting, dan terdapat pandangan

negatif terhadap hasil Musrenbang sebelumnya. Hal ini mengurangi semangat dan partisipasi masyarakat, serta menurunkan motivasi untuk mengikuti Musrenbang.

- 3) Kesulitan Masyarakat dalam Mencapai Kesepakatan: Kesulitan masyarakat dalam mencapai kesepakatan di Musrenbang disebabkan oleh prioritas atau aspirasi yang berbeda di setiap kelompok masyarakat. Adanya ketidaksetaraan partisipasi dan pandangan negatif dari sebagian masyarakat juga turut mempersulit tercapainya kesepakatan.

Untuk mengatasi faktor penghambat ini, Kecamatan Pucuk Rantau telah melakukan upaya seperti pendekatan kreatif, partisipatif, dan sosialisasi sebelum pelaksanaan Musrenbang. Melibatkan tokoh masyarakat, menggunakan media sosial, dan menyederhanakan informasi menjadi beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi diperlukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya Musrenbang dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, mengatasi keterbatasan anggaran, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengelola perbedaan pandangan menjadi fokus utama dalam memperkuat akseptabilitas pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pucuk Rantau.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat aspek Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi yang perlu diperhatikan.

1) Pencapaian Tujuan

- Kecukupan waktu sangat penting dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2022 berjalan sesuai waktu, dengan perwakilan dari setiap kelurahan dan desa berpartisipasi sebagai fasilitator dan pemangku kepentingan
- Meskipun partisipasi masyarakat telah ditingkatkan, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pihak stakeholder pemerintahan. Perlu terus ditingkatkan agar masukan dari masyarakat dapat lebih memengaruhi keputusan.

2) Integrasi

- Komunikasi antara Pemerintah Kecamatan Pucuk Rantau, stakeholder, dan masyarakat masih bersifat satu arah. Sosialisasi lebih lanjut tentang Musrenbang

Kecamatan perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan.

- Dominasi pihak stakeholder dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan perlunya integrasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Upaya komunikasi yang lebih terbuka dan dialog dua arah perlu ditingkatkan.

3) Adaptasi

- Pemerintah Kecamatan Pucuk Rantau berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya.
- Perlunya pemerintah kecamatan mengurangi campur tangan yang dominan dalam berbagai hal dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih jalan hidupnya. Meningkatkan partisipasi masyarakat akan memungkinkan mereka menyuarakan minat, kebutuhan, dan keinginan mereka.

Dalam rangka meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau, perlu terus diperbaiki dalam aspek waktu pelaksanaan, integrasi komunikasi, dan adaptasi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki alur komunikasi, dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi mendapat dukungan yang signifikan melalui beberapa faktor pendukung. Komitmen tinggi dari Camat sebagai pemimpin tertinggi memberikan motivasi dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya Musrenbang di wilayah tersebut. Sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di tingkat Kecamatan juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang. Selain itu, hasil Musrenbang yang tepat sasaran dan sesuai dengan pagu anggaran menjadi kontributor positif terhadap akseptabilitas Pemerintah Kabupaten. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan pagu anggaran yang mengharuskan pemilihan prioritas pembangunan secara selektif. Selain itu, peristiwa menarik selama Musrenbang mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses ini. Upaya meningkatkan komunikasi dua arah, partisipasi masyarakat, dan pemahaman akan Musrenbang menjadi kunci untuk mencapai tingkat akseptabilitas yang optimal terhadap rencana pembangunan di Kecamatan Pucuk Rantau.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, R. Elvinaro, A. (2012). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herningsih, (2016). Kinerja dosen dan karyawan, pendekatan riset ditinjau dari dimensi kepemimpinan, budaya, dan lingkungan organisasi. Malang : media nusa creative
- Karianga, Hendra. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Anwar. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung. Alfabet
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sheth, J. N. dan Sisodia, R. S. (2012). The 4a`S Of Marketing. Creating Value For Customers, Companies And Society. New York. Routledge.
- Widya. P. Setyanto (2011) Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah. Salatiga : Percik-The Foundation
- Aryati Puspasari Abady (2016) perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah: jurnal ilmu administrasi public
- Ayu, D. R. (2017, 13). Apa yang Dimaksud dengan Komunikasi Pembangunan. Retrieved from dictio: <https://www.google.com/>
- Rahman, S. N. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- Aziz, Abdul. Supriyono, Bambang dan Muluk, M.R Khairul. (2013) analisis perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan system lunak (soft system) (studi pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kota malang). E-journal fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya.
- Nugroho, M. R. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Nurmala, N., & SD, Z. R. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rendra, R.(2018). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang . Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3– Nomor 1

- Ripai, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sitompul. A, (2017).. Skripsi sarjana. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan. : Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320, 19-27.
- Zainudin & Sutjiatmi. (2018). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah : Yogyakarta.